

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis peliputan bencana letusan Gunung Sinabung (sejak 14 September 2013 hingga pertengahan tahun 2014) dan letusan Gunung Kelud (13 Februari 2014) ditinjau dari perspektif jurnalisme bencana. Lewat penelitian terhadap kedua bencana yang disebabkan oleh letusan gunung api dan terjadi di waktu yang berdekatan tersebut, peneliti berusaha mengungkap bagaimana jurnalis di media elektronik televisi Indonesia, khususnya Metro TV, meliput insiden-insiden bencana. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, penelitian ini berupaya mengupas *latent meaning* (makna tersembunyi) pada teks-teks berita bencana dengan menempatkannya dalam konteks historis dan sosial.

Asumsi dasar dari penelitian ini ialah korban bencana kini menjadi korban media lewat pemberitaannya yang berkuat pada pemberitaan traumatik dan dramatik. Seperti yang disebutkan Masduki (2008) dalam tulisannya yang berjudul Jurnalisme Bencana Alam di Indonesia, media massa di Indonesia memberitakan bencana dengan mengadopsi pendekatan yang berlaku untuk peristiwa kriminal. Yang ditonjolkan media elektronik TV maupun cetak, masih berkisar pada bagaimana ekspresi sedih wajah-wajah korban dan dahsyatnya

bencana. Dalam buku yang sama, pernyataan Masduki tersebut didukung oleh Nazaruddin yang juga menuliskan hal senada. Menurutnya, media-media di Indonesia menunjukkan euforia saat memberitakan bencana. Sebagian besar media hanya mengeksploitasi bencana sebagai „kisah satir yang menghibur“, demi kepentingan akumulasi modal semata (2008, h.232).

Bahkan, tak sedikit, reporter televisi dalam pemberitaan *live* yang melanggar kode etik jurnalistik dengan menampilkan korban bencana secara vulgar. Mayat korban bencana seperti digunakan menjadi bagian dari „properti“ agar berita yang disajikan lebih menjual ke publik (Junaedi, 2013, h.117). Ini menunjukkan bahwa pemberitaan bencana tak lagi berpihak pada korban, melainkan hanya memenuhi logika dagang.

Fenomena ini lantas menjadi problema karena bila mengacu pada perspektif jurnalisme bencana, peliputan bencana seharusnya berdasar pada etika dan aspek kemanusiaan agar jurnalis pada akhirnya tidak mengeksploitasi bencana dan korban bencana demi keuntungan bisnis media belaka. Bukannya menanyakan hal-hal yang dapat memicu kesedihan korban bencana, media lebih baik mengeksplor penyebab bencana dan bagaimana cara menanganinya. Seperti yang disebutkan dalam buku *Disaster Through A Different Lense: A guide for journalists covering disaster risk reduction* (Leony dkk, h.72), *media should exploring the root causes of disasters and their social dimensions lead to disaster risk reduction stories by asking question such as: Why are disasters happening? How can we prevent disasters? Who is responsible?.* Jadi, bukan dengan menanyakan “Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda memiliki firasat sebelum

bencana ini terjadi?” seperti yang kerap peneliti temukan dalam peliputan bencana di televisi Indonesia selama ini.

Sebab, meski berdalih untuk menumbuhkan solidaritas, bila pemberitaan bencana dengan gaya serupa terus berlangsung, maka akan menimbulkan destruksi opini publik. Masyarakat, yang menjadi audiens dari pemberitaan bencana, hanya akan diajak berempati dengan berdasar pada perasaan kasihan semata. Lama-kelamaan, meminjam istilah Susan D. Moeller, masyarakat kita akan jatuh pada sindrom *Compassion Fatigue*¹. Yakni, bebal dan tak acuh terhadap berita bencana. Masyarakat tak lagi merasa tersentuh. Perasaannya tumpul. Mereka menjadi *immune* terhadap rasa kemanusiaan. Ketika berita-berita menyedihkan itu terlalu sering dijejalkan ke mereka dengan vulgar, pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kepedulian terhadap penderitaan manusia di belahan lain (Arif, 2010, h.140-141).

Sedangkan, di sisi lain, dampak negatif juga terjadi pada para korban bencana. Mereka diseret mentalnya untuk menjadi pengemis di kampungnya sendiri. Memanfaatkan duka lara demi belas kasihan, bukannya memulihkan diri agar mampu menghadapi kondisi mendatang pasca bencana.

¹ *The meaning of compassion is to bear suffering. Compassion fatigue, like any other kind of fatigue, reduces our capacity or our interest in bearing the suffering of others* (Figley, 2002, pg. 1434)

Permasalahan ini pun makin urgen dan signifikan untuk segera diteliti karena Indonesia merupakan negeri yang rentan bencana. Baik yang disebabkan kondisi alam maupun perilaku masyarakatnya. Dari kondisi alamnya,

[k]epulauan Indonesia termasuk dalam wilayah *Pacific Ring of Fire* (deretan gunung berapi pasifik), yang bentuknya melengkung dari utara Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Kepulauan Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik di dunia dan dipengaruhi tiga gerakan bumi, yaitu Gerakan Sistem Sunda di bagian barat, Gerakan Sistem pinggiran Asia Timur dan Gerakan Sistem Sirkum Australia (Zulfika dalam Pertiwi, 2012, h.1)

Dengan kondisi alam sedemikian rupa, tak heran bila Indonesia kemudian menjadi negara yang paling rawan bencana di dunia (berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Resiko Bencana dalam BBC Indonesia, 2011). Kondisi tersebut lantas kian diperparah dengan perilaku masyarakatnya yang terus-terusan mengeksploitasi alam tanpa memikirkan daya dukung lingkungan.

Dalam kondisi yang rentan seperti inilah, informasi bencana yang disampaikan media akan menjadi *the first, the most important*, bahkan kadang *the only one information* yang akan membentuk pengetahuan publik tentang bencana (Nazaruddin, 2008, h.231).

Patut disayangkan, pemberitaan bencana di negeri ini justru masih rendah bila dilihat dari segi informatifnya. Peliputan mengenai bencana yang dilakukan juga masih dipahami oleh jurnalis sebagai informasi yang melayani kepentingan masyarakat di luar lokasi bencana dibandingkan untuk kepentingan masyarakat korban. Dari pengalaman Arif (2010) selama melakukan peliputan bencana

tsunami di Aceh, porsi pemberitaan lebih banyak bicara soal skala kerusakan akibat bencana ataupun analisis ilmiah mengapa bencana tersebut terjadi. Masyarakat korban hampir tak mendapat informasi apapun mengenai panduan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, termasuk harus kemana mencari makanan.

Terlebih lagi, saat pasca bencana, amat jarang pemberitaan yang mengarah pada rehabilitasi dan rekonstruksi serta persiapan yang bisa dilakukan masyarakat bila kedepannya akan terjadi bencana serupa. Tampaknya, dogma “Berita ini tak seksi lagi” kerap jadi alasan para wartawan maupun editor untuk tak lagi menginformasikan peristiwa-peristiwa pasca bencana.

Seperti yang diungkapkan Arif dalam bukunya *Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme*,

[i]ndonesia adalah laboratorium alam yang sangat kaya untuk penelitian tentang ilmu kebumihan dan bencana alam, sekaligus juga kaya dengan sumber liputan mengenai hal ini. Di negara yang dibelit dengan karut-marut politik dan himpitan ekonomi, tema-tema tentang kebumihan dan bencana belum menjadi arus utama di media-media Indonesia, bahkan setelah gempa dan tsunami mengguncang Aceh. (2010, h.128)

Namun, tak ada pula yang bisa disalahkan terhadap pemberitaan bencana yang memprihatinkan di negeri ini. Baik itu dari level wartawan maupun pemilik media. Sebab, hingga kini, media-media di Indonesia memang masih minim akan standar operasional yang jelas dalam meliput bencana. Selain lewat prinsip dan kode etik jurnalistik, patokan yang benar-benar berfokus pada pemberitaan bencana hanyalah Pedoman Perilaku (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS)

2009 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada bab XXIV pasal 34 serta bab XXIII pasal 55 dan 56 tentang Peliputan Bencana Alam dan Musibah.

Bila hanya mengacu pada ketentuan tersebut, tentulah belum dapat mencakupi semua kemungkinan yang akan dihadapi seorang jurnalis saat memberitakan bencana. Pada ketentuan KPI tersebut pun, hanya terdapat tiga pasal yang berkaitan dengan peliputan bencana, di mana kata-kata yang terkandung di dalamnya juga menyimpan makna yang masih sangat luas dan bisa diinterpretasikan secara berbeda-beda. Ditambah lagi, dengan banyaknya media massa yang ada di Indonesia, ketentuan tersebut hanya dikeluarkan oleh KPI. Kondisi ini tentu menjadikan pengawasan terhadap pemberitaan bencana masih longgar dan sangat memungkinkan untuk dilanggar oleh para jurnalis. Apalagi, bila mengingat, KPI sampai hari ini masih terbelit oleh keberadaannya yang belum jelas. Hubungannya dengan pemerintah sebagai fasilitator tidak cukup harmonis. Bahkan, yang lebih menyedihkan, lembaga ini terlibat dalam beberapa kegiatan politik praktis (Wirodono, 2006, h.116).

Selain minim dalam hal pengawasan dan standar operasional pemberitaan bencana, perlu dipertanyakan pula bagaimana sebenarnya persiapan para jurnalis sebelum melakukan peliputan bencana? Sebab, jangan sampai media hanya saling berkompetisi melakukan peliputan di kala bencana itu terjadi, tanpa terlebih dahulu melakukan persiapan amunisi.

Penelitian ini kemudian berfokus hanya pada pemberitaan bencana di media elektronik televisi dengan beberapa alasan. Pertama, sebagaimana dikatakan Amrie (2014, h.2), televisi merupakan media massa terfavorit bagi khalayak dalam memantau perkembangan terkini berita bencana. Hal ini kemudian berkaitan dengan alasan selanjutnya, di mana peneliti mengasumsikan televisi dengan kemasannya yang audio-visual akan lebih dinamis dibanding media lain. Televisi memiliki karakter khas yang mampu menampilkan berita dalam waktu singkat dan dilengkapi visualisasi gambar. Meski tidak secara komplit, lewat tayangan beritanya, penonton televisi pun tak hanya dapat mengetahui jawaban narasumber (baik secara verbal maupun non-verbal), namun juga pertanyaan yang diajukan oleh sang reporter yang kemudian memunculkan/memicu jawaban tersebut. Hal seperti ini tentu tidak dapat ditemukan pada media cetak maupun *online* yang hanya mengandalkan parafrase dari apa yang dilihat oleh sang jurnalis dan kutipan dari narasumber.

Pemberitaan di televisi juga menjadi menarik bagi peneliti karena kekuatan serta efeknya yang lebih masif dibandingkan media massa lainnya. Todd Gitlin, pakar Sosiologi Komunikasi yang pernah menjadi Direktur Program Komunikasi Massa (Mass Communication) di University of California, Berkeley, menyatakan bahwa berita televisi (*TV news*) sangat dipercaya oleh khalayak, karena jurnalisme televisi mempunyai kekuatan besar (*the most powerful force in journalism*) (dalam Panuju, 2005, h.103).

Kepercayaan yang begitu besar terhadap berita televisi kerap kali dikarenakan anggapan bahwa berita televisi tidak dapat menipu dengan adanya gambar yang jelas dan terpampang nyata. Berita televisi tidak sekadar bermain kata-kata layaknya berita-berita di media cetak. Seperti yang diungkapkan Sirikit Syah (1999), orang mudah percaya dengan berita televisi karena mereka melihat gambarnya, mereka kemudian merasa seolah-olah menjadi saksi mata!

Kemasan audio-visual dari televisi tersebut sukses melahirkan pengetahuan yang keliru di masyarakat. Di bukunya yang lain, Syah (2011) juga mengatakan justru karena dianggap *eye witness*, berita televisi sangat mudah dimanipulasi oleh orang yang ingin memanipulasinya. Gambar-gambarnya diatur. Pengaturannya bahkan tidak perlu di level *editing*, melainkan dapat dengan mudah dilakukan di tahap pengambilan gambar.

Dalam hal pengambilan gambar, pengemasan rekaman peristiwa bencana di televisi, bisa bermain dengan sudut pengambilan gambar kamera (*camera angle*), misalnya *medium close up*, *close up*, dan bahkan *big close up*. Dimana, dengan *angle* sedemikian rupa, sisi traumatik dan dramatik dari sebuah bencana bisa menjadi semakin kuat dan eksplosif.

Selain lewat *camera angle*, tak jarang pula, pemberitaan bencana di televisi diiringi oleh musik-musik sendu yang menambah kesan teror dan menyedihkan dari peristiwa tersebut. Lewat komponen-komponen tersebut, pemberitaan bencana di televisi benar-benar disajikan dalam paket komplet dengan bumbu traumatik dan dramatik yang melekat kuat. Oleh karena itu,

peneliti pun mantap memilih berita televisi untuk meninjau praktik peliputan bencana di Indonesia selama ini.

Sedangkan, untuk pemilihan sampel penelitian yang berupa peliputan bencana letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, keduanya merupakan bencana yang disebabkan oleh letusan gunung api. Di mana, peneliti telah menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam wilayah *pacific ring of fire*. Tandanya, resiko bencana akibat letusan gunung api terhitung tinggi di negeri ini.

Kedua, Gunung Sinabung dan Gunung Kelud sama-sama dikategorikan sebagai gunung api dengan tipe A. Yang berarti, keduanya masih aktif hingga saat ini dan mendapat perhatian khusus dari badan vulkanologi. Letusan keduanya pun terjadi dalam waktu yang berdekatan. Gunung Sinabung pertama kali menunjukkan aktivitasnya pada 14 September 2013 (berdasarkan data Buku Pintar Kompas 2013), sedangkan erupsi Gunung Kelud terjadi pada 13 Februari 2014 (berdasarkan data Buku Pintar Kompas 2014). Bahkan, di saat Gunung Kelud meletus, aktivitas Gunung Sinabung juga masih berlangsung. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kala itu Indonesia diterpa oleh dua bencana akibat letusan gunung api dalam kurun waktu yang bersamaan.

Ketiga, menjadi menarik pula bila melihat perbedaan lokasi dari kedua gunung api tersebut. Gunung Sinabung terletak di Sumatera Utara (Luar Pulau Jawa), sedangkan Gunung Kelud terletak di Jawa Timur (Pulau Jawa). Dengan perbedaan ini, peneliti pun ingin melihat apakah nilai-nilai jawasentris (berpusat

di Jawa) yang telah lama mengakar di masyarakat kita ikut berpengaruh pada penerapan jurnalisme bencana saat jurnalis melakukan pemberitaan keduanya? Apakah dengan perbedaan tersebut, media tetap mampu melakukan pemberitaan yang berimbang?

Tak hanya membatasi penelitian pada peliputan bencana di televisi dan hanya pada peliputan bencana letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud, peneliti pun menetapkan Metro TV sebagai sampel penelitian untuk mewakili media elektronik televisi di Indonesia. Alasannya sederhana, karena Metro TV merupakan televisi berita pertama di Indonesia yang beroperasi selama 24 jam. Sehingga, peneliti mengamsusikan Metro TV akan memberikan eksposur lebih banyak terhadap berita bencana bila dibandingkan dengan televisi komersial. Terlebih lagi, berdasarkan penelitian Amrie (2014), kualitas *media performance* Metro TV dalam meliput erupsi Gunung Merapi di tahun 2010 lebih baik dibandingkan dengan TV One yang juga merupakan televisi berita. Dalam penelitiannya tersebut, Amrie menggunakan metode analisis isi dengan dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif sekaligus untuk mengevaluasi kualitas pemberitaan bencana pada Metro TV dan TV One. Dimensi unit analisis yang digunakan Amrie untuk melihat kualitas *media performance* tersebut adalah faktualitas, akurasi, kelengkapan, netralitas, sisi lain situasi bencana, dan humanis.

Penelitian mengenai jurnalisme bencana sendiri memang masih jarang dilakukan di Indonesia. Namun, sebelum penelitian ini dilakukan, setidaknya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Di antaranya, skripsi milik Adhika Pertiwi (2012) yang berjudul “Pemahaman Jurnalis Mengenai Konsep

Jurnalisme Bencana”. Mahasiswi Universitas Indonesia tersebut melakukan penelitiannya dengan mewawancarai lima jurnalis media cetak, media televisi dan media *online*. Jurnalis-jurnalis yang ia wawancarai adalah produser Metro TV, *video journalist* Jogja TV, reporter detik.com, wartawan foto harian Kedaulatan Rakyat, dan wartawan harian Media Indonesia. Dalam penelitiannya, Pertiwi menggunakan paradigma post-positivis, pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Dari penelitian tersebut, ia menemukan bahwa jurnalis memahami konsep jurnalisme bencana sebatas di ranah kognitif. Secara praktik, kelima jurnalis yang ia wawancarai masih belum melakukan peliputan bencana dengan menekankan pada perspektif kemanusiaan. Kelimanya juga masih belum menjadikan peliputan pasca bencana sebagai prioritas.

Selain penelitian Pertiwi, adapula penelitian Betty Gama (2009) mengenai Jurnalisme Bencana dan Rangsangan Emosional Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dalam penelitiannya, Gama mengambil sampel penelitian bencana banjir. Berdasarkan analisis data, dari kelima nilai berita (*timeliness, proximity, consequence, human interest* dan *magnitude*), hanya variabel *proximity* yang tidak mempunyai hubungan terhadap rangsangan emosional mahasiswa. Dengan hasil tersebut, ia pun menyimpulkan bahwa berita-berita mengenai masalah jurnalisme bencana alam mampu mempengaruhi emosi audiens berupa perasaan-perasaan yang tidak menentu seperti rasa sedih, duka, simpati, empati, dan sebagainya. Untuk itu, ia pun menyarankan kepada para jurnalis agar dalam melakukan liputan bencana, tidak memberitakan peristiwa

yang bersifat traumatik dan dramatik karena hal tersebut hanya akan menambah rasa takut dan kekhawatiran masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, lewat penelitian ini, peneliti ingin membuka tabir yang selama ini menutupi praktik jurnalisme bencana di televisi Indonesia. Sebab, terlalu lama dijejali dengan berita-berita bencana yang sarat akan drama, ditambah lagi dengan mitos yang menganggap jurnalis adalah sosok penyampai realita yang objektif, kerap kali membuat kita seakan memaafkan dan menganggap fenomena ini sebagai hal biasa. Jurnalis beserta berita bencana terlanjur punya rutinitas dan pola tertentu yang kemudian membuat kita alpa untuk mengkritisnya.

Lewat kacamata jurnalisme bencana serta pisau analisis wacana kritis milik Norman Fairclough, peneliti ingin memperdebatkan dan mengkritisi praktik peliputan bencana di televisi Indonesia. Lebih dalam lagi, peneliti ingin mengetahui akar dari persoalan peliputan bencana tersebut, apakah disebabkan krisis kecerdasan intelektual dan sosial pelaku media atau justru disebabkan oleh persoalan yang lebih mendasar, yakni perihal hilangnya perasaan empati terhadap sesama manusia, yang berganti dengan nafsu komodifikasi dan eksploitasi untuk kepentingan uang yang menjangkiti semua tingkatan pengambilan keputusan berita sejak jurnalis hingga pemilik media.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di sub-bab latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana praktik peliputan bencana di televisi Indonesia ditinjau dari perspektif jurnalisme bencana?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengupas dan mengeksplorasi praktik peliputan bencana di televisi Indonesia yang ditinjau dari perspektif jurnalisme bencana.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khasanah pemahaman serta menjadi referensi tambahan terhadap penelitian ilmu komunikasi di Indonesia – khususnya dalam ranah jurnalisme bencana. Juga dapat memberikan kontribusi untuk para praktisi media agar berhati-hati dalam melakukan pemberitaan bencana, menjadi acuan bagi para pakar dan akademisi di bidang jurnalistik, sebagai masukan pada organisasi pers untuk merumuskan standar baku peliputan bencana yang ideal serta informasi bagi masyarakat umum agar tak begitu saja menelan mentah-mentah pemberitaan bencana di media.

I.5. Tinjauan Pustaka

I.5.1. Jurnalisme Bencana

Dalam penelitian yang berupaya membongkar praktik peliputan bencana di televisi Indonesia ini, peneliti akan mengacu pada prinsip-prinsip jurnalisme bencana sebagai salah satu *genre* baru dalam dunia jurnalistik. Di mana, menurut Dewi (2011), pers yang beretika lah yang menjadi awal dan pondasi dari perkembangan berbagai *genre* jurnalisme. Seperti jurnalisme damai yang menekankan pada etika pers dalam meliput berita-berita konflik, jurnalisme bencana berfokus pada etika dalam memberitakan bencana secara manusiawi, yang tidak mengeksploitasi bencana beserta korbannya hanya demi keuntungan bisnis media belaka. Fokus dari jurnalisme bencana tersebut sejalan dengan tujuan penelitian ini yang memang ingin membuktikan apakah memang kini korban bencana telah menjadi korban media lewat pemberitaan-pemberitaan yang memiliki tendensi komodifikasi.

Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana jurnalisme bencana itu, pertama kali, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan makna kata “Jurnalisme” dan “Bencana” secara harfiah.

Jurnalisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya (kewartawanan). Dari segi kata, jurnalisme berasal dari kata “Jurnal” yang memiliki arti laporan dan “Isme” yang

memiliki arti paham/ajaran. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jurnalisme merupakan suatu bentuk aliran tertentu dalam dunia jurnalistik. Sedangkan, definisi dari kata jurnalistik amat banyak dan beragam. Bergantung pada masing-masing cara pandang. Namun, menurut A. Muis, dalam Baksin, semua definisi jurnalistik memasukkan unsur media massa, penulisan berita, dan waktu yang tertentu (aktualitas) (2006, h.47-48). Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, peneliti pun meminjam definisi jurnalistik milik Fraser Bond (dalam Baksin, 2006), yang mengatakan bahwa,

[i]stilah jurnalistik mencakup semua bentuk penyebaran berita bersama komentarnya untuk mencapai orang banyak (publik). Semua kejadian di dunia, asalkan sifatnya penting bagi publik dan semua pikiran, tindakan serta ide-ide, yang didorong oleh kejadian-kejadian tersebut, menjadi bahan pemberitaan bagi wartawan (h.48).

Di sisi lain, bencana didefinisikan oleh UU no. 24 tahun 2007 sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari pengertian tersebut, oleh negara, bencana dikategorikan menjadi tiga, yakni bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Hanya saja dalam penelitian ini yang difokuskan ialah peristiwa bencana alam (bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan

oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor).

Mengerucut dari pengertian-pengertian diatas, definisi jurnalisme bencana yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana media memberitakan bencana (Hermawan, Bernas Jogja, 22 Februari 2007; Amirudin, Suara merdeka, 26 April 2006 dalam Nazaruddin, 2008, h.230). „Bagaimana memberitakan“ dalam pengertian tersebut kemudian peneliti anggap mengandung dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses merujuk pada bagaimana proses produksi berita-berita bencana oleh para jurnalis di media massa, sedangkan dimensi hasil mengacu pada bagaimana berita-berita bencana tersebut dikemas dan disajikan ke khalayak media.

Di Indonesia, peran media massa dalam pemberitaan bencana lahir saat momentum terjadinya bencana tsunami di Aceh di penghujung 2004 (Nazaruddin dalam Pertiwi, 2012, h.17). Sebelum itu, menurut penuturan Arif (2010), hingga awal dasawarsa 1990-an, selalu ada jeda antara waktu terjadinya bencana dengan pemberitaan, mulai dari dua hari, seminggu hingga hampir sebulan. Pemberitaan yang ditayangkan pun hanya dalam porsi yang kecil. Misalnya saja, ketika tsunami melanda Halmahera pada 5 April 1969. Beritanya baru dimuat 20 hari kemudian di surat kabar Kompas. Berita itu pun masih berkabut karena tak diikuti dengan berita lainnya di kemudian hari. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena

keterbatasan akses informasi maupun transportasi memang menjadi halangan terbesar pada era tersebut.

Sedangkan, di masa sekarang, informasi mengenai peristiwa bencana dapat diketahui khalayak media pada hari yang sama, bahkan hanya berjarak beberapa menit atau jam dari waktu kejadian. Termasuk pada pemberitaan bencana letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud yang menjadi sampel penelitian kali ini.

Bicara soal jurnalisme bencana, tentu ada perlakuan yang cukup “istimewa” dalam hal peliputan dan pemberitaannya, bila dibandingkan dengan pemberitaan hal lain. Diantara, ada lima prinsip jurnalistik bencana yang dipaparkan oleh Masduki (2008), yakni:

- 1) Mengajak warga masyarakat melupakan masa lalu yang kritis dan menyeramkan dengan menyuguhkan optimisme.
- 2) Menginisiasi masyarakat untuk bangkit dan menatap ke depan dengan menyuguhkan berbagai solusi praktis yang secepatnya bisa dilakukan
- 3) Menjadi wadah bagi proses penemuan kembali antarkeluarga yang terpisah (*lost and found*)
- 4) Menyediakan informasi dasar tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak terkait bencana yang menimpa warga
- 5) Menyediakan ruang setara bagi semua pihak terutama perempuan dan anak-anak untuk berekspresi, tidak hanya pejabat negara.

Tak hanya itu, dalam buku panduan berjudul *Disaster Through a Different Lens: A Guide for Journalists Covering Disaster Risk Reduction* yang diterbitkan oleh United Nations, ada acuan ringkas yang dapat menjadi pedoman jurnalis saat memberitakan bencana. Yakni,

[j]ournalists do more than just break the news. There are many ways of getting disaster risk reduction into the public consciousness, ways that can inform, educate and raise awareness and concern about particular threat. They can question the performance of governments, and alert and help a particular vulnerable audience to cope with a potential disaster. They can draw attention to vulnerability, and warn of “disasters in the making” based on risk assessments. Such reports raise the controversial elements of governance, corruption, budgetary folly, and, of course, potential danger.

Di sisi lain, Amirudin dalam Pertiwi (2012) juga menjelaskan lima prinsip dasar yang bisa menjadi rujukan dalam meliput. Pertama, akurasi. Bukan saja akurat dalam hal mengungkapkan penyebab kecelakaan dan bencana alam, melainkan juga akurat dalam penyebutan waktu kejadian, tempat, nama serta jumlah korban. Tak kalah penting pula, akurat dalam pengungkapan posisi dan situasi terakhir kejadian. Kedua, berlaku pula prinsip pemberitaan yang harus memperhatikan aspek manusia (*human elements*). Ketiga, suara korban berupa harapan, keluhan, keinginan, dan rasa sedih yang diterima harus diberikan ruang editorial yang lebih banyak. Perspektif korban harus mendapatkan porsi lebih besar daripada porsi kepentingan ekonomi, politik, dan primordialisme yang justru bisa mengacaukan situasi dalam upaya *recovery*. Keempat, jurnalis dalam meliput peristiwa traumatik tidak seharusnya bersikap sekadar

menempatkan diri sebagai „pemulung fakta“ yang baru saja terkaget-kaget mendapatkan temuan, dan langsung memasukkannya ke dalam „karung fakta“. Kelima, ungkapkan sisi lain yang kemungkinan luput dari pandangan publik. Sebagai khalayak, publik membutuhkan kejelasan tentang informasi dan nilai-nilai yang dapat menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak.

Ringkasnya, dari ketiga rujukan tersebut, yang ditekankan ialah aspek kemanusiaan serta aspek informatif dari sebuah pemberitaan bencana. Media massa diharapkan mampu menjalankan fungsi umumnya, yaitu; *to inform, to educate, to entertain, and to influence* – menginformasikan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi (Widodo, 1996, h.111).

Selain memenuhi prinsip-prinsip diatas, ada beberapa hal kecil, namun penting yang juga perlu untuk dipraktikkan dalam praktik peliputan dan pemberitaan bencana. Misalnya, seperti yang dianjurkan oleh Poynter Institute for Media Studies dan The Dart Centre for Journalism and Trauma (dalam Arif, 2010), kepada media elektronik televisi, agar sebelum menayangkan adegan yang mempertontonkan korban, sebaiknya ada peringatan terlebih dulu kepada pemirsa supaya orangtua bisa menjauhkan anak-anak kecil dari tontonan tersebut.

Curtis (2007) juga mengatakan bahwa dalam jurnalistik yang sesungguhnya, setelah media memberikan premis yang mengerikan mengenai suatu bencana, haruslah disertai dengan alasan mengapa khalayak harus peduli dengan bencana tersebut sehingga khalayak pun tahu apa yang harus mereka lakukan.

Begitu pula bila bicara soal *framing* atau pembedahan berita bencana. Abrar (2008) menawarkan pembedahan dengan gaya *suggesting remedies*, yaitu menawarkan solusi dengan menunjukkan apa yang harus dilakukan disertai dengan efek yang mungkin terjadi.

Prinsip maupun poin penting yang telah disebutkan itu kemudian akan diaplikasikan oleh jurnalis dalam suatu fase jurnalisme bencana, yang sebenarnya tak jauh berbeda dengan fase dari manajemen bencana. Yakni, melibatkan empat tahapan, yaitu mitigasi, kewaspadaan, tanggapan, dan pemulihan (dalam Susanto, 2006).

Lebih detailnya, berikut tahapan normatif pemberitaan bencana menurut Nazaruddin (Jurnal Komunikasi Vol.1, 2007, h.172) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel I.1. Tahapan Normatif Pemberitaan Bencana

Fase	Periode	Waktu	Topik Utama	Narasumber
Prabencana		Sepanjang waktu sebelum bencana	Informasi mengenai antisipasi bencana	Warga, aparat, ahli

Tanggap bencana	Darurat	Pada waktu terjadi bencana hingga satu hari sesudahnya	Informasi dasar dan akurat tentang jenis dan sumber bencana, cara menyelamatkan diri	Ahli, aparat
Pascabencana	Darurat	1-2 pekan pasca-bencana (bencana berskala kecil-menengah) 1-2 bulan pasca-bencana (bencana berskala besar)	Informasi kawasan bencana, cara memperoleh dan memberikan bantuan logistik, lokasi pengungsian, jumlah korban, dan kerugian	Warga, aparat, relawan
	Recovery	1-2 pekan pasca-bencana (bencana berskala kecil-menengah) 1-2 bulan pasca-bencana (bencana berskala besar)	Informasi kondisi pengungsian secara lebih lengkap (penghuni, interaksi sosial, bantuan), recovery psikologis, gerakan penemuan keluarga, pendidikan darurat, kontrol bantuan bencana	Warga, aparat, relawan, ahli

	Rehabilitasi	1-2 pekan pasca-bencana (bencana berskala kecil-menengah) 1-2 bulan pascabencana (bencana berskala besar)	Kampanye bangkit, rehabilitasi sosial dan ekonomi, pembangunan kembali kerusakan fisik, distribusi bantuan rumah dan usaha produktif, control bantuan bencana	Warga, aparat, relawan, ahli
--	--------------	--	---	------------------------------

Sumber: Nazaruddin (2007, h.172)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bagaimana setiap fase berfokus pada topik yang berbeda, yang kemudian mengandalkan narasumber yang berbeda pula. Perbedaan skala bencana pun ikut mempengaruhi seberapa lama pemberitaan bencana harus dilakukan.

1.5.2. Ekonomi Politik Media dan Peliputan Bencana di Indonesia

Di latar belakang, peneliti telah mengatakan bahwa jurnalis dan institusi media massa kekinian terus menuai kritik akibat pemberitaan bencana yang terus diwarnai suasana traumatik dan dramatik. Korban bencana tak ubahnya menjadi korban media. Dengan doktrin “*Bad News is a Good News*”, media massa kemudian menempatkan bencana sebagai *a*

perfect media event. It's brief, spectacular, often mysterious, action-oriented, and portrays human suffering and courage (Bolduc dalam Wahyuni, 2008, h.5).

Dengan asumsi demikian, maka pemberitaan bencana tentu tak lepas dari permainan ekonomi politik media. Berita bencana tak ada bedanya dengan berita lain yang merupakan barang dagangan. Menurut Lukmantoro (2007), sebagai komoditas, berita-berita bencana memiliki keunggulan untuk terus menerus diperdagangkan. Sebab, hampir di setiap berita bencana pastilah bermuatan nilai-nilai berita yang memberikan jaminan laris untuk dijual. Yakni, (1) Aktualitas; (2) Membawa dampak kerusakan/kehancuran dalam skala masif; (3) Memuat unsur kedekatan (*proximity*); (4) Memuat kontroversi dan konflik; (5) Dikaitkan dengan hal-hal yang memiliki popularitas tinggi (bisa bangunan bersejarah atau tokoh yang memberikan sumbangan); (6) Sering dikaitkan dengan bencana-bencana lain; dan (7) Selalu menonjolkan aspek ketidakwajaran atau keluarbiasaan. Singkatnya, berita bencana gampang memuat kabar-kabar negatif.

Jadi, berita bencana tak ada bedanya dengan berita-berita lain. Meminjam istilah Allan (dalam Burton, 2011), berita merupakan „konstruksi ideologis atas realitas“ (h.174). Sebuah berita sama sekali bukan seperti yang kerap kali diklaim, yakni merepresentasikan realitas sebagaimana adanya. Berita tidak selalu „sementah“ dan sefaktual yang diinginkan. Justru, berita berbicara atas nama ideologi dominan. Ideologi

dominan merupakan wadah potensial bagi nilai-nilai berita sebab berita berbicara melalui gambaran-gambaran ihwal faktualitas yang jelas terlihat (Burton, 2011, h.175). Dengan kenyataan yang sedemikian rupa, maka tidak terlalu salah jika ditarik kesimpulan bahwa relasi yang menghubungkan pihak media dengan khalayak tidak lain merupakan hubungan yang bersifat ekonomis belaka, yakni penjual dan pembeli. Seperti yang diungkapkan Lukmantoro (2007, h.46),

[p]ihak media merupakan pedagang berita yang menjalankan pengemasan fakta. Sementara itu, khalayak merupakan konsumen yang melakukan praktik pembelian fakta yang telah terkemas dalam wujud berita. Berita, dalam perspektif ini, adalah hasil transaksi dari arena pasar yang bermuatan tebaran fakta.

Komodifikasi berita seperti ini telah dianggap sebagai suatu kenormalan di praktik-praktik jurnalisme. Untuk itu, peneliti pun menganggap pendekatan ekonomi politik media relevan dengan fokus penelitian ini. Sebab, pendekatan tersebut berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media.

Bicara soal ekonomi politik media, tentu tak lepas dari Vincent Mosco. Dalam bukunya *The Political Economy of Communication 2nd Edition* (2009), Mosco mendefinisikan ekonomi politik sebagai *the study of the social relations, particularly the power relations, that mutually constitute the production, distribution, and consumption of resources, including communication resources* (h.2). Dari pengertian tersebut, dapat

dikatakan bahwa pendekatan ekonomi politik, membahas bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi suatu sumber komunikasi dipengaruhi oleh kekuatan tertentu. Termasuk pada media elektronik televisi yang dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk komunikasi massa.

Lebih lanjut lagi, Mosco menjabarkan ekonomi politik media melalui tiga koridor, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Penelitian ini sendiri hanya berfokus pada komodifikasi. Di mana, komodifikasi diartikan Mosco sebagai *the process of transforming use to exchange value* (2009, h.11). Komodifikasi bicara soal perubahan nilai guna menjadi nilai tukar. Yang tentunya hal ini dapat kita amati pada peliputan bencana yang berlandaskan pada logika dagang.

Maka, pada dasarnya, apa yang disajikan oleh media adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Menurut Shoemaker & Reese (dalam Dewi, 2011), ada lima level yang mempengaruhi isi media sebuah pemberitaan, yaitu:

- 1) Pengaruh individu-individu pekerja media (*individual level*): Ini mencakup karakteristik pekerja media, latar belakang personal, dan latar belakang profesional mereka.
- 2) Level rutinitas media (*media routine level*): Adanya tuntutan tenggat waktu, keterbatasan *space* atau ruang berita, struktur penulisan, dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di sebuah institusi media.

- 3) Level pengaruh organisasi (*organizational level*): Batasan yang diberikan oleh organisasi media sebagai institusi yang berorientasi pada keuntungan (institusi bisnis)
- 4) Level ekstramedia: Adanya aktivitas *public relations*, organisasi media lain, pemasang iklan, audience atau khalayak, kebijakan pemerintah, situasi politik, kekuatan pasar, dan teknologi.
- 5) Ideologi (*ideological level*): Ideologi merupakan suatu doktrin, filosofi, tubuh kepercayaan atau prinsip yang dimiliki oleh media massa, yang mempengaruhi seluruh aktivitas dalam media tersebut.

I.5.3. Etika dan Regulasi Jurnalistik dalam Peliputan Bencana

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pondasi dari jurnalisme bencana adalah pers yang beretika. Untuk itu, peneliti menganggap etika dan regulasi jurnalistik, terutama yang berkaitan dengan peliputan bencana, penting untuk menjadi landasan peneliti dalam menganalisis praktik peliputan bencana di televisi Indonesia. Meski memang, tak ada standar yang baku bila bicara soal etika. Sebab, etika bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan. Etika dapat berbeda bergantung pada konteksnya. Namun, secara umum, dalam konteks penelitian mengenai peliputan bencana ini, kode etik profesi jurnalistik dapat menjadi panduan sekaligus koridor atas kinerja para pegiat jurnalistik dan media massa sebagai institusinya. Seperti yang dikatakan Anwar (dalam Fajri, 2008), kode etik

jurnalistik merupakan suatu pola dimana komunikator (dalam hal ini, jurnalis dan institusi media massa) hendak mewujudkan rasa tanggung jawab dengan mengadakan pengaturan diri. Ia merupakan pegangan bagi pers dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.

Kode etik jurnalistik yang beredar di Indonesia pun jumlahnya lebih dari satu. Sebab, masing-masing lembaga dan organisasi jurnalistik punya pegangan tersendiri mengenai etika dalam melakukan pemberitaan. Namun, dalam penelitian ini, salah satu kode etik jurnalistik yang akan menjadi acuan adalah Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dirumuskan oleh Dewan Pers Indonesia. Berdasarkan penuturan Masduki (dalam Fajri, 2008), KEWI merupakan kontrol moral yang telah disepakati semua organisasi wartawan cetak maupun elektronik. KEWI ditetapkan sebagai kode etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia oleh Dewan Pers, sebagaimana diamanatkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, melalui Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000, tanggal 20 Juni 2000.

Dari 11 pasal dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dirumuskan tahun 2006 tersebut, yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini hanyalah satu pasal saja, yakni pasal 2. Pasal tersebut mengatakan bahwa “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Pasal tersebut kemudian dipaparkan lebih lanjut dalam beberapa penafsiran, dimana

salah satu penafsirannya ialah wartawan harus menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.

Selain mengacu pada KEWI, peneliti juga berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Terdapat tiga pasal dalam peraturan tersebut yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Bab XXIV tentang Peliputan Bencana Alam.

Pasal 34

Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
- b. Tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; dan/atau

- c. Menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan.

Selanjutnya, peneliti juga mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, Bab XXIII, tentang Peliputan Bencana Alam dan Musibah.

Pasal 55

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena bencana alam.

Pasal 56

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang:

- a. Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga dan masyarakat yang terkena bencana alam dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- b. Menampilkan saat-saat menjelang kematian;
- c. Mewawancara anak di bawah umur sebagai narasumber dalam kejadian bencana alam;

- d. Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail (*big close up, medium close up, extreme close up*); dan/atau
- e. Menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

Selain itu, regulasi di luar bidang jurnalistik yang peneliti anggap berkaitan dengan penelitian ini ialah UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada bab V, undang-undang tersebut mengatur mengenai tanggung jawab masyarakat ketika dihadapkan dengan bencana alam. Mengapa peneliti menganggap peraturan ini relevan? Sebab, peneliti menempatkan jurnalis sebagai bagian dari society, yang juga harus melakukan kewajibannya sebagai masyarakat. Berikut penjabaran kewajiban masyarakat yang tercantum di Bab V, Bagian Kedua, tentang Kewajiban Masyarakat:

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan

- c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Tak hanya menjadi bagian dari masyarakat, peneliti juga menempatkan jurnalis sebagai bagian dari institusi media massa. Dimana, institusi media massa merupakan suatu lembaga usaha. Untuk itu, Bab VI, Bagian Kesatu mengenai Peran Lembaga Usaha juga ikut menjadi acuan penelitian ini. Berikut penjabarannya:

Pasal 29

- 1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- 3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

I.5.4. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Untuk mengupas dan mengeksplor praktik peliputan bencana di televisi Indonesia, peneliti menganggap analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough sebagai metode yang paling mampu mengakomodir tujuan penelitian ini. Sebab, seperti yang dikatakan Sobur (2004, h.68), melalui analisis wacana, peneliti bukan hanya bisa mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Ini sejalan dengan tujuan peneliti yang memang ingin mengetahui bagaimana peliputan bencana dipraktikkan di televisi Indonesia.

Lebih lanjut lagi, analisis wacana yang digunakan peneliti akan berlandaskan pada paradigma kritis. Hal ini dikarenakan paradigma kritis tidak hanya menekankan bahwa bahasa dalam sebuah teks menyimpan pesan *latent* (tersembunyi), namun juga berusaha menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana. Badara (2012) mengatakan analisis wacana dengan pandangan kritis digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Bagaimana bahasa terlibat dengan kekuasaan, terutama dalam membentuk subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Ini sesuai dengan yang diasumsikan peneliti pada latar belakang masalah bahwa terdapat kekuasaan yang berlangsung di balik sebuah peliputan bencana. Peneliti melihat adanya kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik tertentu yang menyebabkan praktik

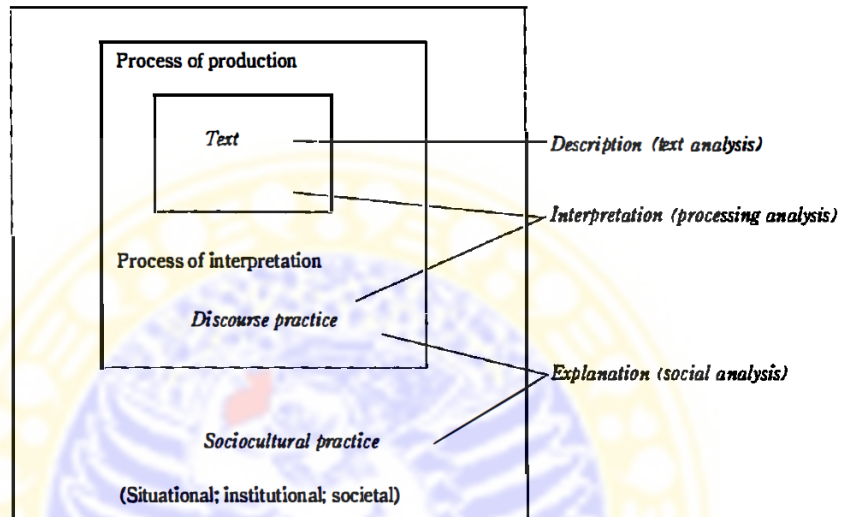
peliputan bencana menjadi tidak sejalan dengan prinsip jurnalisme bencana.

Dari beberapa *linguist* yang mengembangkan analisis wacana kritis, peneliti menilai analisis wacana kritis (critical discourse analysis) milik Norman Fairclough yang paling mampu mengakomodir penelitian ini. Berbeda dengan Van Dijk dan Wodak, CDA milik Fairclough tidak berhenti pada studi bahasa. Namun, juga memperhatikan bagaimana konteks, proses produksi dan konsumsi suatu teks. Eriyanto (2001, h.285) mengatakan lewat model analisis wacananya, Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang berkontribusi dalam analisis sosial dan budaya. Fairclough melihat bahasa sebagai suatu praktik kekuasaan, sehingga ia meyakini bahwa seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia atau sebagai bentuk representasi dalam melihat realitas.

Dalam bukunya, CDA milik Fairclough (1995) mengintegrasikan tiga hal, yakni: (1) *Analysis of text*; (2) *Analysis of processes of text production*; dan (3) *Sociocultural analysis of the discursive event as a whole*. Di mana, analisis teks merupakan cara menganalisis bahasa secara kritis yang bertujuan untuk mengungkap makna. Analisis proses teks produksi sebagai praktik diskursus yang memfokuskan pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Sedangkan, analisis sosio-kultural didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media turut mempengaruhi bagaimana wacana dimunculkan dalam sebuah teks.

Ketiga hal tersebut kemudian dirangkum Fairclough dalam satu kerangka berikut.

Bagan I.1. Kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough



Sumber: Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (1995, h.98)

Badara (2012, h.66) mengatakan bahwa kerangka analisis milik Fairclough, pada intinya menghendaki bahwa untuk memperoleh pemahaman teks secara utuh, analisis yang dilakukan pada teks juga harus diletakkan pada konteks sosio kultural dan latar belakang si pembuat teks.

Maka, dari kerangka analisis Fairclough tersebut, nantinya *output* penelitian ini akan terdiri atas tiga poin penting. Yakni, (1) Analisis teks secara deskriptif tanpa dihubungkan dengan aspek lain (deskripsi); (2) Tafsiran teks yang dikaitkan dengan praktik wacana (interpretasi); serta (3)

Penjelasan hasil penafsiran teks yang dihubungkan dengan konteks (eksplanasi).

I.6. Metodologi Penelitian

I.6.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Filstead dalam Chadwick et al (1991) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif mengacu pada strategi penelitian yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi tangan pertama mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri. Dari pengertian tersebut, peneliti pun mantap memilih pendekatan kualitatif dikarenakan tujuan penelitian ini memang membedah praktik peliputan bencana di televisi Indonesia hingga ke akar masalahnya.

Sedangkan, yang menjadi fokus penelitian ialah bagaimana media elektronik televisi dalam melakukan peliputan bencana. Di mana, penelitian ini berfokus hanya pada peliputan bencana letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud di Metro TV.

I.6.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksploratif. Djiwandono (2015, h.108) mengatakan bahwa penelitian dengan tipe ini sifatnya mendalami suatu fenomena dalam konteks sosial tertentu. Apa yang disampaikan keduanya ini senada dengan tujuan peneliti yang ingin mengupas dan membedah praktik peliputan bencana di televisi Indonesia secara mendalam. Di mana, data maupun penelitian yang berkaitan dengan tema ini pun masih minim jumlahnya di Indonesia.

I.6.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Di mana, menurut Eriyanto (2001), titik perhatian besar dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan, bukan sekadar aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu. Oleh karena itu, metode ini dipilih peneliti karena sesuai dengan asumsi penelitian bahwa terdapat kekuasaan disalahgunakan. Lewat metode ini, peneliti ingin melihat bagaimana dominasi dijalankan dan direproduksi dalam teks (berita televisi termasuk teks).

Metode ini pun dapat mempelajari bagaimana produksi wacana berlangsung dan relasi kuasa apa saja yang ada di belakangnya. Ringkasnya, metode ini bertujuan untuk mengkritik ideologi yang

melatarbelakangi sebuah wacana dengan mengupas asumsi-asumsi kebenaran yang seringkali telah menjadi *common sense* di masyarakat.

Berbeda dengan ilmuwan lain, analisis wacana kritis milik Fairclough mengombinasikan tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Mengaitkan sesuatu yang mikro (teks) dengan sesuatu yang makro (masyarakat). Sehingga, peneliti akhirnya merasa metode ini yang paling tepat, sebab peneliti tak sekadar ingin mendeskripsikan praktik peliputan bencana di televisi Indonesia, namun membongkar lebih dalam dan mengupas permasalahan pemberitaan bencana hingga ke akarnya.

I.6.4. Unit Analisis Data

Berdasarkan kerangka analisis CDA Fairclough, unit analisis dari penelitian ini adalah teks. Dalam hal ini, yang dimaksudkan sebagai teks adalah bagian-bagian dari tayangan berita bencana letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud di Metro TV. Bagian-bagian tersebut meliputi bahasa tubuh (*gesture*), bahasa yang digunakan oleh reporter dan *news anchor*, serta hal-hal lain yang menggunakan tanda-tanda (*codes*) untuk mengomunikasikan pada penonton perihal peristiwa bencana yang terjadi. Peneliti juga melihat penggunaan narasi berita, *caption* berita, bahasa-bahasa perpindahan kamera (*moving point of camera*), dan sebagainya.

I.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer pada penelitian ini berupa teks-teks berita letusan Gunung Sinabung dan letusan Gunung Kelud yang ditayangkan di Metro TV. Peneliti juga mengumpulkan data melalui *indepth interview* dengan pihak redaksi Metro TV. Sedangkan, data terkait konteks historis dan sosial saat bencana terjadi ditelusuri peneliti melalui literatur dan internet.

I.6.6. Teknik Analisis Data

Dalam Eriyanto (2001), dikatakan bahwa analisis wacana kritis milik Fairclough terdiri dari tiga hal, yakni teks (representasi, relasi, identitas), *discourse practice* (individu wartawan, relasi antara wartawan dengan struktur media, rutinitas kerja) dan *sociocultural practice* (situasi sosial dan institusional). Sehingga, dalam penelitian ini pun analisis dilakukan dalam tiga tahapan, yakni:

- 1) Peneliti melakukan analisis tekstual terhadap penayangan pemberitaan bencana Letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud di Metro TV. Analisis ini dilakukan peneliti dengan menganalisis judul, *angle* berita, *lead*, narasi reporter, narasi *news anchor*, narasi *voice over*, hingga manuver kamera yang digunakan di setiap berita bencana yang menjadi data primer penelitian ini.

- 2) Peneliti melakukan analisis kognisi sosial dan relasi kuasa dalam proses produksi berita-berita bencana Letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud tersebut, melalui wawancara mendalam dengan para wartawan dan pengelola media yang terlibat.
- 3) Peneliti melakukan analisis wacana bencana Letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud yang beredar di masyarakat, melalui penelusuran literatur dan/atau wawancara mendalam dengan pakar-pakar terkait.

